



**BULETIN**

# **PARLEMENTARIA**

NOMOR: 771/V/2013

III/MEI 2013



## **Penyesuaian Harga BBM Pilihan Pahit yang Harus Diambil**

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) dan [tvparlemen.com](http://tvparlemen.com)

# KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA MEI 2013

Minggu ketiga bulan Mei ini kegiatan Dewan ditandai dengan disampaikannya Pidato Pembukaan Ketua DPR-RI Masa Persidangan IV 2012-2013 pada rapat paripurna tanggal 13 Mei 2013. Berikut adalah beberapa poin penting kegiatan DPR minggu ketiga Mei 2013.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

## Rapat Paripurna 13 Mei 2013

Mengawali Pembukaan Masa Persidangan IV, Ketua DPR-RI merefleksikan dua momentum penting yang jatuh pada bulan Mei, Hari Buruh sedunia (1 Mei) dan Hari Pendidikan Nasional (2 Mei). Hari buruh sedunia dipeeringati serentak di seluruh dunia, dan di Indonesia dilaksanakan dalam bentuk unjuk rasa buruh di berbagai daerah. Peringatan ini menjadi momentum mengingatkan Pemerintah untuk terus memperkuat kemauan politiknya dalam mendorong semua pemangku kepentingan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan buruh. Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional, Pimpinan Dewan menegaskan bahwa momentum ini harus semakin menguatkan kemauan dan tekad sebagai bangsa beradab dan berbudaya dalam mewujudkan visi dan misi adiluhung penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.



Berkaitan dengan fungsi legislasi, Pimpinan mengingatkan bahwa pada 2013, DPR dan Pemerintah telah menetapkan 70 RUU menjadi prioritas. Pimpinan Dewan berharap, DPR dan Pemerintah harus lebih meningkatkan tugas menuntaskan sejumlah RUU prioritas. Kira-kira, 19 RUU akan dilanjutkan pembahasannya, karena sudah memasuki pembahasan tingkat I. Sejumlah RUU prioritas yang sedang menunggu penyelesaian antara lain, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, RUU Tabungan Perumahan Rakyat, dan RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diharapkan dapat diselesaikan pada bulan Mei ini. RUU ini merupakan produk reformasi yang memberikan ruang

kepada rakyat dengan berbagai fasilitas program dan kemudahan bagi rakyat, khususnya petani. RUU ini juga merupakan upaya pemberdayaan petani untuk mencapai kesejahteraannya agar lebih baik, mampu mandiri dan memiliki keunggulan kompetitif. Sementara RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terhadap perumahan. Adapun RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sangat penting, mengingat kontribusi TKI melalui remittance yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

Selain itu, Pimpinan Dewan mengingatkan bahwa proses pembahasan RUU ke depan harus memperhatikan putusan MK, berkaitan dengan kewenangan DPD-RI dalam pengajuan sampai dengan pembahasan RUU. Hal ini penting dilakukan, untuk menghormati keputusan MK dalam

rangka melaksanakan Konstitusi. DPR bersama dengan Pemerintah akan melakukan revisi terhadap UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

Berkenaan dengan fungsi anggaran, dalam masa Sidang IV, DPR-RI akan melakukan pembahasan dalam bentuk Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2014. DPR akan menyelenggarakan Rapat Paripurna pada tanggal 20 Mei 2013, dimana Pemerintah akan menyampaikan Keterangan tentang Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro (PPKF-KEM), sebagai acuan pembahasan RAPBN 2014. Pemerintah juga akan menetapkan Kebijakan Umum





dan Prioritas Anggaran tahun 2014 sebagai acuan dalam penyusunan anggaran setiap kementerian/lembaga. Diharapkan, APBN tahun 2014 dapat semakin memperkuat stabilitas perekonomian nasional yang kondusif bagi pertumbuhan dan pemerataan keadilan, penciptaan lapangan kerja, dan menopang pembangunan berkesinambungan. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi nasional, APBN 2014 nantinya harus lebih berkualitas dan memberikan manfaat secara nyata dan langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam masa sidang ini, Pemerintah juga akan menyampaikan laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun 2013.

Untuk pembahasan APBN-P 2013, Ketua DPR menyampaikan hasil konsultasi dengan Presiden yang pagi itu dilaksanakan di Istana Negara. Hasil konsultasi ini, pada intinya adalah Pembahasan RUU APBN-P 2013, akan dipercepat melalui surat yang akan disampaikan presiden pada 14 Mei 2013. Sesuai prosedur dan mekanisme DPR, maka pembahasan akan segera dilakukan, dan diharapkan pada minggu ketiga bulan Juni, sudah dapat diselesaikan. Percepatan pembahasan RUU APBN-P 2013 ini amat berkaitan dengan subsidi BBM dan deviasi asumsi makro-ekonomi.

Mengenai fungsi pengawasan, Pimpinan menyampaikan beberapa hal penting yang akan diagendakan dalam Masa Sidang IV. Diantaranya adalah Tim Kerja Pengawas Kasus Bank Century. Pimpinan juga menyampaikan agenda Alat Kelengkapan Dewan mengenai penanganan dan tindak lanjut terhadap aspirasi dan pengaduan masyarakat atas serangkaian isu, peristiwa atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat secara umum. Persoalan upah buruh, tenaga kerja alih daya, jaminan sosial pekerja, perlindungan hukum, sarana dan prasarana pendidikan, masalah pertanahan, adalah beberapa isu yang patut mendapatkan perhatian DPR. Pimpinan Dewan berharap, DPR lebih responsif terhadap aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada lembaga DPR.

Materi lain yang disampaikan dalam pidato adalah serangkaian peristiwa dan persoalan yang berdampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan aparat TNI, Polri, dan antar-kelompok masyarakat, penumpasan terhadap jaringan terorisme oleh Aparat Kepolisian. Jaringan terorisme belum juga dapat dituntaskan, walaupun penumpasan terus dilakukan oleh Densus 88. Selain itu, Peristiwa bantakan massa antara warga masyarakat Musi Rawas dan aparat terkait pemekaran wilayah, juga disampaikan dalam Pidato Pembukaan Sidang ini. Meninggalnya empat warga Kecamatan Rupit, Musi Rawas, Sumatera Selatan, dan luka kritis beberapa aparat, patut disesalkan. Penanganan unjuk rasa oleh aparat Kepolisian dianggap tidak tepat, sehingga menimbulkan korban jiwa.

Berkaitan dengan masalah persiapan Pemilu, terjadinya duplikasi nama bakal calon legislatif dalam beberapa Daerah Pemilihan atau yang tercantum tidak hanya di satu partai politik, Pimpinan Dewan menegaskan bahwa hal tersebut

harus segera dikoreksi. Dewan mendorong KPU bekerja secara cermat dan hati-hati dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilu. Selain itu, Pimpinan Dewan mengingatkan agar seluruh kebijakan KPU harus senantiasa selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pimpinan meminta perhatian akan penanganan masalah penegakan hukum dan penanganan kasus korupsi, mendorong para penegak hukum untuk menjalankan tugas secara tegas dan profesional.

Dalam masalah ekonomi, Ketua menyampaikan bahwa Polemik kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi salah satu isu yang terus mengemuka khususnya menyangkut isu tenggat waktu berlakunya, target sasaran, besaran kenaikan, dan skema kompensasi bagi rakyat, khususnya kelompok rakyat miskin. Untuk itu, permasalahan akan dibahas dalam pembahasan RUU APBN-P 2013.

Berkaitan dengan masalah Ujian Nasional, Masa Reses, Komisi X mengundang Mendikbud untuk membahas permasalahan Ujian Nasional (UN) tahun 2013. Dewan memandang bahwa Pelaksanaan UN tahun 2013 menjadi salah satu catatan buruk dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Oleh karena itu, Dewan sepakat dengan Pemerintah agar hasil UN SMA dan sederajat tahun 2013 yang akan dijadikan sebagai syarat kelulusan dan persyaratan masuk perguruan tinggi negeri, perlu dipertimbangkan melalui kajian mendalam. Dewan juga mendesak Pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Segera menyelesaikan investigasi proses pelaksanaan pengadaan naskah UN tahun 2013 dan memberikan sanksi serta menyerahkan hasilnya secara resmi kepada Komisi X.

Hal lain yang disampaikan adalah masalah upah dan gaji yang merupakan salah satu faktor produksi yang penting. Kebijakan tentang upah yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan pekerja harus terus ditingkatkan, sesuai komitmen yang selalu disampaikan oleh Dewan kepada Pemerintah. Dalam kaitan itulah, Dewan merasa perlu untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Tenaga Alih Daya untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Panja Alih Daya yang sedang dalam proses pembentukan, bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dengan praktek tenaga alih daya.

Dalam bidang internasional, Ketua Dewan dalam pidatonya, mencermati hasil KTT ASEAN ke-22 di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam. Dewan melihat, bahwa upaya mewujudkan komunitas ekonomi ASEAN telah mencapai kemajuan. Dalam masalah ini, Dewan mengingatkan Pemerintah, bahwa terbentuknya komunitas ekonomi ASEAN pada akhirnya harus didedikasikan untuk kepentingan rakyat. Dewan mendorong Pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai terkait dengan upaya peningkatan daya saing ekonomi kita dan memastikan bahwa keberadaan komunitas ekonomi ASEAN harus bermanfaat bagi kepentingan nasional. Dalam masalah keamanan kawasan, Pimpinan Dewan menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam, karena KTT ASEAN belum

mampu mendorong penyelesaian sengketa di wilayah Laut Cina Selatan.

Terkait dengan merebaknya kampanye separatisme dan anti-Indonesia di luar negeri, Dewan mengingatkan Pemerintah agar hal ini diperhatikan, karena taruhannya adalah teritorial dan NKRI. Sebagai konsekuensinya, Kementerian Luar Negeri yang merupakan ujung tombak diplomasi luar negeri, harus meningkatkan kualitas kinerja diplomatnya, agar isu yang menyudutkan kepentingan nasional tidak terulang kembali.

Di akhir pidato, Ketua Dewan mengajak seluruh Anggota Dewan, untuk bersungguh-sungguh mendarmabaktikan tugas dan fungsi bagi bangsa dan negara pada tahun-tahun akhir masa bhakti DPR. Kerja keras harus diwujudkan dalam memenuhi amanat yang dipercayakan rakyat kepada para anggota Dewan.

### Diplomasi Parlemen

Ketua DPR dan Ketua Parlemen Belarus pada kesempatan kunjungan di Minsk Belarusia, 3 hingga 6 Mei 2013, telah menandatangani MoU kerjasama antar Parlemen Indonesia dan Belarus, yang akan mendorong kerjasama antar komisi

Parlemen kedua negara di berbagai forum internasional. Sebagai landasan guna mempererat hubungan ini, kedua Ketua Parlemen sepakat untuk mendukung prakarsa pembentukan Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) di masing-masing parlemen. Untuk menjaga keberlanjutan kerjasamanya, kedua Pihak sepakat untuk mendorong upaya tindak lanjut dari komitmen-komitmen kerjasama yang disepakati dengan Indonesia pada saat kunjungan Presiden Lukashenko ke Jakarta bulan Maret lalu.

Terkait dengan kerjasama bilateral di segala bidang, kedua belah pihak secara spesifik, sepakat untuk mendukung dan memfasilitasi upaya *joint cooperation* atau *production* pengadaan alat-alat berat, alat-alat pertanian, bahan dasar pupuk, peralatan militer serta peningkatan kerjasama bidang pendidikan dan sosial-budaya. Dalam kunjungan muhibah ini, Delegasi DPR RI berkesempatan pula untuk mengunjungi Wilayah Grodno, sekitar 250 km sebelah barat Minsk, ibukota Belarus dan bertemu dengan Gubernurnya, Borisovich Shapiro. Ketua DPR RI dan Gubernur Grodno sepakat untuk melakukan peninjauan kerjasama antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Grodno. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan ini, akan diadakan pertemuan tiga pihak antara Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dengan Dubes RI dan Dubes Belarus untuk Indonesia.\*\*

# Penyesuaian Harga BBM, Pilihan Pahit yang Harus Diambil



Pimpinan DPR menghadiri  
Pembukaan Masa  
Persidangan IV Tahun  
Sidang 2012/2013

Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, penyesuaian harga BBM bersubsidi menjadi pilihan pahit yang harus diambil, dalam rangka menyelamatkan APBN dan kepentingan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.



Ketika menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan IV tahun 2012/2013 di depan Sidang Paripurna Senin (13/5), Ketua DPR melanjutkan, jika tidak dilakukan penyesuaian harga, nilai subsidi akan mencapai lebih dari Rp 297 triliun, angka yang semakin di luar batas kemampuan psikologis APBN.

Menurut Marzuki, konsumsi BBM bersubsidi yang memperoleh kuota 46 juta kiloliter akan terlampaui, diperkirakan akan mencapai 48-56 juta kl. Hal itu akan semakin menekan APBN dan diperkirakan akan meningkatkan defisit, melampaui ketentuan dalam UU. Tekanan terhadap APBN, sambung Ketua DPR, terjadi dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu.

“Sehubungan dengan itu, Dewan mengingatkan pemerintah untuk tidak ragu-ragu dan segera mengambil keputusan,” tandas Marzuki.

Namun, pidato tersebut menuai protes melalui intrupsi anggota DPR. Anggota F-PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan fraksinya tidak setuju akan kenaikan harga BBM. Masyarakat akan merasa keberatan apalagi tarif listrik baru saja naik. Karena itu, ia minta DPR mencari jalan keluar terbaik agar BBM tidak naik.

Anggota DPR F-Hanura Erick Satria Wardana menyatakan pidato Ketua DPR sudah melampaui hak-hak kewenangan pimpinan DPR. Dia meminta pimpinan menarik kata-kata yang ada di halaman 13 pidato. Seharusnya lanjut Erick, kewenangan kenaikan BBM menjadi domain Komisi VII DPR

yang selanjutnya dibawa ke sidang Paripurna.

Anggota F-PDI Perjuangan Arya Bima dan anggota F- PKS Ansory Siregar juga menilai pidato soal kenaikan harga BBM itu melampaui kewenangan sebagai Ketua DPR. Mereka menegaskan tidak seharusnya pidato itu disampaikan, seolah-olah DPR sudah memutuskan kenaikan BBM, padahal itu wilayah eksekutif.

Kepada pers, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan Pimpinan DPR bisa menyampaikan, harapan, pandangan dan merespon apa yang terjadi di masyarakat, sama dengan alat kelengkapan dewan (AKD) yang lain. “Jadi pidato pembukaan itu adalah pemandangan, pencermatan apa-apa yang kira-kira akan direspon oleh AKD yang akan datang,” jelasnya.

Ketika ditanyakan, apakah tidak ada komunikasi dengan anggota fraksi, Marzuki menjawab “Saya kira media sangat tahu persis. Contohnya, apa yang telah diputuskan BURT dimana semua anggota fraksi ada, tapi anehnya keputusan rapat BURT sering dibantah oleh teman-temannya sendiri,” tukasnya.

Pidato pimpinan itu, kata Marzuki, sebelum dibacakan ada tim yang menyusun dan sudah pasti diedarkan kepada pimpinan yang lain, kepada seluruh fraksi dan komisi-komisi terkait untuk diminta masukan tanggapan dan koreksi. Kalau tidak ada koreksi maupun tanggapan sampai tanggal yang ditentukan maka dianggap pidato itu sudah sesuai harapan mereka.

## Penguatan infrastruktur:

Di bagian lain pidatonya Ketua DPR menekankan, hasil penghematan subsidi BBM harus dialokasikan untuk penguatan infrastruktur pengolahan energi nasional dan diversifikasi penggunaan sumber energi, khususnya sumber energi terbarukan. Bagi DPR, pilihan ini menjadi suatu keniscayaan untuk mewujudkan ketahanan energi nasional ke depan.

Dikatakan pula, gejala sosial akibat keterlambatan pasokan premium di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu, dan kekurangan solar baru-baru ini, cukup memberikan pelajaran penting bahwa krisis energi pada akhirnya berdampak pada isu ketahanan energi dan mengancam stabilitas semua aspek kehidupan nasional.

Hal lain yang menjadi keprihatinan DPR adalah kenaikan harga beberapa komoditas pangan yang akan berdampak pada inflasi, yang pada gilirannya akan berdampak pada semakin tidak terjangkaunya harga pangan.

“Untuk itu seluruh program pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang telah dialokasikan dapat dilaksanakan melalui mekanisme yang benar dan tepat sasaran,” ungkapnya.

DPR juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar instansi, mengantisipasi dan melakukan pengawasan ke pasar, sehingga dapat menghitung jumlah stok pangan sesuai dengan tingkat kebutuhan. (mp)/  
foto:iwan armanias/parle.

# Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Presiden Singgung BLT

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menjelaskan dalam Rapat Konsultasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat menyinggung penerapan kembali Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rakyat miskin yang terkena imbas apabila rencana kenaikan harga BBM ditetapkan. Presiden berharap DPR dapat memahfumi kebijakan ini.

“Beliau tadi mengusulkan soal aspek proteksi sosial, bantuan beras miskin dan uang tunai selama sekian bulan tidak setahun seperti dulu. Jadi dalam konteks ini beliau meminta pimpinan dewan dapat memahfumi,” kata Priyo kepada wartawan usai rapat yang berlangsung tertutup di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/5/13).

Bagi Politisi Fraksi Partai Golkar ini yang paling penting adalah mekanisme penyalurannya harus transparan dan tidak teropinikan dilakukan oleh 1 atau 2 kelompok saja. “Kami bisa memahfumi tapi nanti harus ada mekanisme yang memungkinkan itu dilakukan secara transparan,” tekannya.

Priyo yang hadir dalam rapat bersa-



ma 4 Pimpinan DPR lain menyebut kebijakan BLT tersebut adalah kebijakan negara yang merupakan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR. Senada dengan Presiden, ia juga berharap rencana kenaikan harga BBM ini dapat dibahas dalam suasana yang lebih sejuk.

“Kita tunggu, besok secara resmi pemerintah dalam hal ini Presiden akan menyampaikan surat resmi (RAPBN-P) kepada DPR,” pungkas dia. (iky), foto : eka hindra/parle/hr.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso memberi keterangan pers

## Komisi V DPR Minta PT KAI Matangkan Besaran PSO bagi Peralihan Kereta Ekonomi

Komisi V DPR meminta Dirjen Perkeretaapian dan PT KAI untuk mematangkan besaran *Public Service Obligation* (PSO) bagi peralihan Kereta Non AC menjadi Kereta AC.



Anggota Komisi V Saleh Husin (F-Hanura)

“Kita perlu kejelasan atau breakdown PSO itu, dimana semula harga tiket Rp. 2000 menjadi Rp. 8000 rupiah,” ujar anggota DPR Hikmat Tomet (F-PG) Saat RDP dengan Dirjen

Perkeretaapian Tundjung Inderawan, dan Dirut PT KAI Ignasius Jonan, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M.Said, di Gedung Nusantara, Rabu, (15/5).

Saleh Husin (Fraksi Hanura) mengakui rencana kenaikan harga tarif kereta non AC dari Rp. 2000 menjadi Rp. 8000 cukup memberatkan bagi masyarakat menengah bawah. “Kita mengharapkan KRL ekonomi ke AC dapat segera digunakan dan masyarakat bisa membeli tiket yang disepakati dan tidak memberatkan,” ujarnya.

Dia mengakui secara keamanan KRL ekonomi tidak layak dan mayoritas gerbong cenderung sudah tua. “Memang secara *safety* KRL ekonomi diragukan dan tiket juga cukup mahal,” terangnya.

Muhammad Arwani Thomafi (Fraksi PPP) mengatakan, saat ini telah terlihat adanya perbaikan pelayanan KA. kendala yang dihadapi KAI terkait per-



Anggota Komisi V Muhammad Arwani Thomafi (FPP)

gantian non AC ke AC yaitu persoalan komunikasi. “Intinya perlu adanya perbaikan pelayanan kepada masyarakat, maksud dan tujuan itu baik namun belum nyambung, ada kekhawatiran bagi masyarakat bila tarif ekonomi dihapus pendapatan mereka tentunya akan berkurang dan tidak sebanding dengan pengeluaran sehari-hari,” paparnya. (si)/foto:wahyu/parle/iw.

## PT KAI Masih Minim Sosialisasi Terkait Nasib KA Ekonomi

Komisi V DPR menilai PT KAI masih minim sosialisasi terkait rencana pergantian KRL ekonomi menjadi KRL AC. Hal itu mengemuka saat Komisi V DPR mengadakan RDP dengan Dirjen Perkeretaapian Tundjung Inderawan, dan Dirut PT

KAI Ignasius Jonan, di Gedung Nusantara, Rabu, (15/5).

“PT KAI terlihat minim sosialisasi terkait pergantian kereta non AC ke AC, sebenarnya persoalan bukan menerima atau



Anggota Komisi V Teguh Juwarno (F-PAN)

menolak, tetapi kalangan masyarakat melihat tarif semakin melonjak jika memungkinkan itu memakai PSO harga bisa ditekan minimal sehingga tidak ada masyarakat yang menolak,” ujar anggota Komisi V DPR Rendy Lamadjido dari F-PDI Perjuangan.

Sadarestuwati (F-PDIP) mendukung langkah yang dilakukan oleh PT KAI dalam menata stasiun-stasiun yang ada. “Ini merupakan pengambilan keputusan yang sangat berani dari PT KAI, namun mohon diperhatikan juga nasib para pedagang yang berada di lingkungan tersebut, karena mereka menggantungkan hidupnya di lokasi stasiun,” ujarnya.

Sementara Teguh Juwarno (F-PAN) mengatakan, BUMN harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu. “Jadi walaupun harus memberikan keuntungan bagi negara PT KAI harus memberikan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu. Karena itu, kedepan memang harus lebih efisien karena kita mulai beralih ke moda kereta,” paparnya. (si)/foto:wahyu/parle/iw.

## Komisi VIII Minta Kemenag tertib dalam Mengajukan Anggaran

Beberapa waktu yang lalu muncul surat edaran oleh Kementerian Agama RI yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kanwil Kementerian Agama, seluruh Rektor Perguruan Tinggi Agama Islam dan seluruh Madrasah tentang tidak cairnya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang disebabkan oleh pembintangan Komisi VIII DPR RI.

Menindaklanjuti hal tersebut Komisi VIII melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Agama RI yang diwakili oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Nur Syam.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah mengatakan bahwa surat edaran tersebut tidak benar. Menurut Ida, tidak cairnya dana BOS itu lebih disebabkan karena keterlambatan dari Kementerian Agama sendiri dalam mengajukan anggaran.

“Sesungguhnya yang terlambat diajukan itu anggaran keseluruhan di Kementerian Agama RI. Sementara mitra Komisi VIII lain mengajukan persetujuan anggaran di awal Desember 2012, sedangkan Kementerian Agama mengajukan persetujuan anggaran keseluruhannya itu pada pertengahan



Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziyah didampingi Wakil Ketua Komisi VIII Jazuli Juwaini.

Februari 2013, itu saja sudah dengan sendirinya membuat anggaran itu terblokir,” tambah Wakil Ketua Komisi VIII, Jazuli Juwaini.

Diungkapkan Ida, ketika anggaran tersebut diajukan pada pertengahan Februari kemudian ada ketidaksinkronan atau kesalahan angka yang tertera



dengan jumlah yang dibutuhkan. Hal itulah yang menurut Ida juga membuat Menteri Keuangan tidak bisa mencairkan anggaran Kementerian Agama.

“Ada 3,9 Triliun dari 44 Triliun dana yang masih butuh pendalaman atas masukan dari berbagai pihak termasuk internal Kementerian Agama, yaitu Irjen. DPR memiliki hak budgeting atau anggaran, dimana kami tidak ingin kesalahan pada tahun sebelumnya terulang lagi pada tahun ini. Dengan prinsip kehati-hatian, maka kami butuh mendalami yang 3,9 Triliun itu. Tetapi dari 3,9 Triliun itu tidak ada seperak pun dana BOS untuk rakyat miskin, dan tidak ada satu perak pun dana rutin yang menyangkut gaji pegawai dan karyawan. Karena kami sadar betul tidak mungkin ada karyawan yang kerja tidak menerima gaji. Kedua kami sadar betul orang miskin itu pendidikannya terhenti karena tidak

mampu karena tidak ada biaya operasional,” papar Jazuli.

Belajar dari kasus ini, dengan tegas Ida meminta agar Kementerian Agama kedepannya untuk lebih tertib dan lebih rapi lagi dalam membuat anggaran dan laporan. Sehingga tidak ada satupun korban akibat keterlambatan tersebut.

Sementara itu Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama, Nur Syam saat ditemui usai RDP dengan Komisi VIII Rabu (15/5) mengatakan bahwa dana tersebut sudah cair pada Rabu (8/5) lalu. Nur Syam juga berjanji akan memberikan atau membayarkan dana BOS itu tidak bertahap alias secara penuh. Bahkan ia juga berjanji untuk tertib dalam mengajukan anggaran dan membuat laporan. (Ayu)/foto:odjie/parle/iw.

## Komisi VI Dukung Revitalisasi Stasiun



Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto.

Revitalisasi stasiun kereta api yang dilakukan PT. KAI sepanjang jalur Jabodetabek mendapat apresiasi dan dukungan dari Komisi VI DPR RI. Stasiun-stasiun kereta api terlihat lebih tertib dan bersih. Demikian disampaikan Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto (F-PG), saat ditemui di Stasiun Bogor dalam kunjungan lapangan, Rabu (15/5).

“Komisi VI mendukung revitalisasi stasiun KA. Tetapi di lain pihak kita juga menginginkan agar para Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) diberi kesempatan

usaha yang layak. Ada perbedaan *treatment* terhadap UKM kecil dan UKM modern seperti usaha ritel,” ungkap Airlangga. Dalam pantauannya, menurut Airlangga, ada banyak keluhan dari para pedagang yang tergusur.

Para pedagang kecil tampak tidak mendapat tempat berdagang. Akibat dari revitalisasi ini, belum jelas benar ke mana para pedagang tersebut akan ditempatkan. “Tadi kita berhenti di beberapa stasiun. Kelihatan tidak ada lokasi yang tersedia untuk mereka. Kami akan panggil pemilik lokasi

sekitar, apakah dimiliki pemerintah daerah atau perhubungan, untuk memberi kesempatan kepada para pedagang memperoleh tempat relokasi usaha.”

Dikatakan Airlangga, Komisi VI akan berusaha membantu mencari lokasi yang tepat bagi para pedagang. “Kita nanti akan carikan lokasi-lokasi yang dimiliki PJKA atau Pemda setempat, baik Kota Bogor, Kabupaten Bogor, atau DKI untuk mereka mendapatkan tempat yang layak. Sistemnya terserah kepada pemerintah. Biasanya IKM itu sewa,” tutur Airlangga.

Lahan PJKA, lanjut Airlangga, tidak boleh diklaim oleh pihak mana pun. Lahan itu tidak boleh diduduki. Harus steril dari kepentingan kelompok. Sementara oknum-oknum preman yang biasa bermain dengan menyewa dan memungut retribusi kepada para pedagang di stasiun juga harus dibersihkan. “Oknum-oknum preman mesti dibersihkan. Kita dukung IKM-nya bukan preman. Kita tidak dukung preman yang menjual konsesi di dalam wilayah PJKA,” tandas Airlangga. (mh)/foto:odjie/parle/iw.



# TV Parlemen Kerja Sama Dengan Beritasatu TV Sebarluaskan Kegiatan DPR



Serah terima MoU antara Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti dengan Pemred Beritasatu TV, Don Bosco Selamun.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Rabu (15/5) ditandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) atau perjanjian kerjasama antara Kesetjengan DPR RI dengan Beritasatu TV. Perjanjian kerjasama ditandatangani langsung oleh Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti dengan Pemimpin Redaksi Beritasatu TV, Don Bosco Selamun.

“Tujuan dari kerjasama ini untuk ikut membantu TV Parlemen dalam menyiarkan dan mempublikasikan kepada masyarakat luas mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan

fungsi kedewannya. Hal ini sejalan dengan arahan dari pimpinan DPR tentunya,” jelas Win, begitu ia biasa disapa.

Ditambahkannya, hal ini sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas agar tidak hanya mendengar berita negatif tentang DPR RI, tetapi juga

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang kiprah, kinerja dan kegiatan DPR RI baik yang berkaitan dengan dewan maupun kesetjengan.

Win mencontohkan, jika sebelumnya muncul berita negatif tentang adanya anggota dewan yang absen saat rapat paripurna, atau adanya anggota dewan yang terlihat mengantuk saat rapat.

“Ketidakhadiran anggota dewan saat rapat yang disertai dengan surat ijin, maka hal itu tidak melanggar Undang-undang. Sementara adanya anggota dewan yang terlihat mengantuk

tuk saat rapat paripurna, itu bisa saja disebabkan karena anggota tersebut di hari-hari sebelumnya disibukkan dengan rapat-rapat lainnya, seperti rapat komisi, rapat Pansus ataupun rapat Panja. Kami tahu persis bagaimana anggota dewan bekerja,” papar Win.

Sementara itu kenapa memilih Beritasatu TV sebagai salah satu partner atau mitra kerja dalam menyiarkan kegiatan DPR, Win menjelaskan bahwa untuk jenis tivi kabel (*Cable TV*) Beritasatu merupakan terbesar ketiga di Indonesia. Bahkan tayangan Beritasatu juga bisa diakses melalui internet.

Bagi Beritasatu TV sendiri kerjasama ini memberikan *added value* tersendiri. Hal ini menurut Don Bosco Selamun, selaku Pemimpin redaksi sebagai sebuah kepercayaan dari lembaga tinggi negara dalam menyiarkan kegiatan-kegiatannya.

“Kami mengutamakan pemberitaan yang positif, jauh dari caci maki. Bahkan kamipun tidak ada program kriminal. Rencananya kami akan menamai berita tentang DPR ini dalam program Beritasatu Suara. Dimana kami akan hadir secara langsung setiap hari lima jam, dengan jam rerun tak terbatas,” jelas Don Bosco. (Ayu)/foto:ray/parle/iw.

## RUU Keperawatan Beri Proteksi Bagi Perawat

Memberikan proteksi hukum yang jelas kepada perawat agar tenang dan aman dalam menjalankan tugasnya memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, merupakan salah satu urgensi lahirnya RUU tentang Keperawatan.

“Sebagaimana kita tahu, di setting pelayanan kesehatan yang lebih banyak berperan itu adalah perawat, dokter itu biasanya yang dicari oleh keluarga kemudian meminta tolong perawat dan biasanya di telpon apakah ada di klinik atau di poli,” kata Ketua

Panja RUU Keperawatan, Nova Riyanti Yusuf.

Namun dalam menjalankan tugasnya perawat seringkali dikriminalisasi aparat, padahal mereka menolong. Pada kondisi-kondisi darurat seperti bencana alam dan lain sebagainya, ada suatu masa dimana tidak mungkin perawat itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang mungkin kalau dilihat oleh orang awam, apakah itu menjadi wewenang dari seorang perawat.

Secara substansial, RUU Keperawat-

an mencoba untuk meningkatkan profesi keperawatan dari profesi-profesi yang telah ada. Kondisi saat ini, jumlah perawat jauh lebih banyak dari jumlah dokter, untuk itu perlu ditingkatkan mutu perawat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Perawat tugasnya banyak, dan itu harus sejalan dengan peningkatan mutu termasuk akreditasi perawat yang selama ini tidak ada. UU Perawat akan dibuat sekomprensif mungkin,” paparnya.

Substansi yang akan diatur RUU Keperawatan adalah mengenai pendidikan keperawatan yang isinya mengenai kompetensi, registrasi, dan lisensi. Selain itu pengaturan keperawatan, hak dan kewajiban, pembentukan organisasi profesi serta pembinaan dan pengembangan.

“Ini memang sedikitnya menimbulkan arogansi pihak lain, tapi niat kita ini untuk meninggikan profesi perawat, bukan untuk menyaingi dokter. Kami ingin ada kesetaraan, karena dalam menangani pasien ada manajemen kasusnya. Dokter dan perawat tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” jelas Nova.

RUU Keperawatan, dalam pembahasannya sebagaimana surat dari presiden akan melibatkan lima kementerian,



Wakil Ketua Komisi IX sekaligus Ketua Panja RUU Keperawatan Nova Riyanti Yusuf.

yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Walaupun lintas sektoral, Nova berharap pembahasan RUU Keperawatan dibahas oleh Panja Komisi IX, tidak perlu lewat Pansus (lintas komisi).

“Jika dibahas dalam panja, kemungkinan besar dapat diselesaikan sebelum tahun 2014, karena jika dibahas di pansus kita harus menerangkan dari awal konsep RUU Keperawatan kepada komisi-komisi lain,” imbuhnya. (sc) foto:ry/parle

## Kehadiran Anggota DPR Belum Jadi Perhatian Partai



Anggota Badan Kehormatan (BK) Ali Maschan Moesa.

Partai Politik berperan besar dalam meningkatkan kinerja anggota DPR dalam menjalankan tugas-tugas kedewannya. Menurunnya tingkat kehadiran dan kinerja patut diduga karena lemahnya pengawasan dan sanksi yang diberikan partai.

“Menurut saya partai sendiri tidak memandang kehadiran itu penting sehingga banyak anggota yang tidak aktif malah dicalonkan kembali, jadi kehadiran bagi partai bukan sesuatu yang harus dipertimbangkan,” kata anggota Badan Kehormatan (BK) Ali Maschan Moesa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/13).

BK sebagai alat kelengkapan yang bertugas menjaga citra dan kehormatan anggota telah berupaya membangun sistem untuk meningkatkan kinerja. Sejak 2 tahun lalu absensi rapat paripurna selalu dipampangkan ke publik segera setelah rapat selesai. Terkait kehadiran anggota dibawah 50 persen menurutnya publiklah yang seharusnya menghukum.

“Kita juga punya sanksi yang disepakati bersama dalam UU MD3 yaitu anggota diberhentikan apabila tidak hadir dalam rapat paripurna 6 kali berturut-turut. Kalau 5 kali tidak masuk kemudian kali ke-6 datang ya menurut UU tidak bisa diberi sanksi. Seharusnya dengan diumumkan ke publik wakil rakyatnya tidak aktif, konstituen bisa memberi sanksi jangan dipilih lagi,” tandasnya.

Saat ini BK lanjutnya sudah mengusulkan sanksi yang lebih ketat untuk mengoptimalkan kehadiran anggota. “4 kali berturut-turut dalam satu masa sidang tidak hadir, kita berhentikan, itu kalau revisi UU MD3-nya disepakati,” demikian Ali Maschan. (iky) foto: Nita/Parle.



# RUU P3 Meningkatkan Kemandirian dan Kedaulatan Petani

Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (RUU P3) ditujukan untuk melindungi petani dari gagal panen dan resiko harga, serta meningkatkan kemandirian dan kedaulatan petani. Petani sekarang ini dianggap tidak berdaulat, sehingga Pemerintah harus memberikan proteksi dan pemberdayaan petani.

“Fakta di lapangan, realitas petani saat ini membutuhkan regulasi yang memungkinkan banyak bantuan untuk petani.” ungkap Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, saat diskusi Forum Legislasi, di Press Room, Gedung Nusantara III, Selasa (14/5).

RUU ini juga diselaraskan dengan UU Pangan No 16 Tahun 2012, yang isinya mendorong pemerintah agar peningkatan produksi pertanian didasarkan kepada kedaulatan dan kemandirian. Selain itu, produksi pertanian ini juga terkait dengan target-target yang direncanakan oleh pemerintah.

“Tentunya harus ada dorongan, semangat dan pendampingan oleh pemerintah. Kalau spirit dan keinginan petaninya sudah tidak ada, maka tar-

get peningkatan produksi tidak bisa dicapai, apalagi lahan pertanian telah tergradasi atau beralih fungsi. Petani tidak mampu mempertahankan lahannya, bukan hanya karena faktor keekonomian tetapi karena tidak mampu diolah bernilai ekonomis,” katanya.



Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron.

Selain itu, lanjut Herman, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memberikan kepastian usaha tani, karena harga komoditas petani sangat fluktuatif. Dengan UU ini pula para petani bukan saja mempunyai harapan hasil pertaniannya baik, tetapi hasil

pendapatannya juga akan lebih baik lagi.

“Kita tahu sarana irigasi kita sudah tidak memungkinkan memberikan daya dukung yang baik karena hampir 50% dari keberadaan irigasi kita rusak, sehingga undang – undang ini mengamankan kewajiban pemerintah untuk segera memperbaiki sarana dan prasarana itu,” papar politisi partai Demokrat ini.

Lebih lanjut Herman mengatakan, dalam pembahasan RUU P3 sudah ada titik terang akan dibentuknya bank petani, meski secara teknis ada hambatan. Sebagai jalan tengah pihaknya menyetujui pembentukan unit khusus yang menangani pertanian di bank-bank pemerintah dengan kemudahan dan penyederhanaan.

“Melalui Anggaran Pemerintah perlu ada penugasan-penugasan khusus baik berupa insentif, subsidi bunga maupun terhadap program-program lainnya yang nanti akan ditentukan,” katanya. (as)/foto:odjie/parle/iw.

## Priyo Protes Kantor OPM ke Anggota Parlemen Inggris

Pidato Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat membuka secara resmi acara *Round Table Discussion on the International Criminal Court* juga diwarnai pernyataan sikap kepada Mark Pritchard anggota parlemen Inggris yang hadir dalam pertemuan tersebut. Sebagai negara yang bersahabat baik, Indonesia menurutnya kecewa atas dibukanya kantor OPM di kota Oxford.

“Saya titip karena baru saja kemarin kami kaget atas pembukaan salah satu kantor OPM di Oxford. Saya mohon maaf sebagai pimpinan parlemen, saya harus menyampaikan pernyataan keras, saya meyakini Pak Mark ini adalah atas nama persahabatan yang telah kita rintis bersama antara Indonesia dan Inggris Raya,” katanya dalam acara yang berlangsung di Ruang Rapat BKSAP, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/13).



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso.

la memaparkan reaksi keras juga disampaikan sejumlah komponen masyarakat termasuk anggota DPR bahkan ada yang mengusulkan aksi balasan dengan membuka kantor perwakilan Irlandia Utara, daerah yang juga menuntut kemerdekaan. “Ada yang usul apakah Inggris nyaman apabila di salah satu kota di Indonesia dibuka kantor perwakilan Irlandia Utara (IRA),” tandasnya.

Menjawab hal ini Mark Pritshard yang juga Ketua Grup Kerja Sama Parlemen Inggris-Asean menyebut sampai

saat ini kebijakan pemerintah dan parlemen Inggris tidak berubah, tidak mendukung kemerdekaan Papua. Ia menerangkan ada sistem yang berbeda di negaranya sehingga kota Oxford punya hak untuk melakukan sesuatu.

“Kita punya hubungan parlemen yang baik, saling mengunjungi. Saya yakinkan kita tidak mendukung kemerdekaan Papua. Itu tidak berubah,” ungkap dia. (iky)/foto:iwan armanias/parle.

## Ratifikasi Statuta Roma Bukan karena Didikte



Suasana acara Round Table Discussion BKSAP DPR bekerja sama dengan Parliamntarians for Global Action (PGA).

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso meyakini cepat atau lambat Indonesia akan meratifikasi Statuta Roma, kesepakatan Internasional yang merupakan dasar pendirian dari Mahkamah Pidana Internasional. Namun ia menekankan proses ratifikasi itu bukan karena didikte negara maju.

“Kalau akhirnya Indonesia meratifikasi Statuta Roma bukan karena bongkokan atas permintaan negara lain, bukan pendiktean negara maju kepada negara yang lebih lemah,” ungkapnya saat membuka acara Round Table Discussion yang dilaksanakan BKSAP DPR bekerja sama dengan Parliamntarians for Global Action (PGA).

Ia juga menyampaikan harapan

kehadiran Mahkamah Pidana Internasional jangan hanya semata-mata sebagai pedang pengadilan yang menebas siapapun penguasa negara berkembang yang dinilai secara sepihak oleh kaca mata barat sebagai pemimpin otoriter, kejam dan anti demokrasi.

Secara khusus ia juga mempertanyakan kepada PGA yang didukung anggota parlemen dari 130 negara di dunia, kenapa tidak berhasil membujuk Amerika Serikat meratifikasi statuta ini. “Kenapa masyarakat internasional dan para aktivis sampai hari ini gagal dalam meyakinkan negeri adidaya Amerika Serikat untuk mendukung dan bergabung dalam Statuta Roma ini,” tandasnya.

Diskusi yang berlangsung di Gedung DPR ini menurutnya menjadi langkah merajut kembali semangat untuk meratifikasi statuta yang sejauh ini telah didukung lebih dari 122 negara di dunia. PGA sebagai pendukung acara adalah organisasi jaringan anggota parlemen yang bekerja bersama untuk mencari solusi bagi masalah-masalah global.

Turut berpartisipasi dalam diskusi Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsudin, Presiden PGA Ross Robertson yang juga anggota parlemen dari Selandia Baru, Board Member of PGA Mark Pritchard sekaligus anggota parlemen dari Inggris, pejabat Kemenkumham, LSM dan Komnas HAM. (iky)/foto:iwan armanias/parle.



# Perlu Perbaiki Sistem Seleksi Anggota BPK

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Sumarjati Arjoso menilai perlu adanya perbaikan pada sistem seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perbaikan ini dapat dilakukan melalui perubahan pada Undang-Undang (UU) BPK, sehingga proses pemilihan anggota lebih memperhatikan kompetensi calon dan tidak ada unsur politik di dalamnya.

“UU BPK terlalu longgar mengatur persyaratan calon anggota BPK. Tidak ada persyaratan kompetensi, pengalaman, dan tidak adanya panitia seleksi untuk memilih calon yang kompeten sebelum dipilih oleh DPR, menjadikan proses seleksi ini sarat akan pertimbangan politik. Tidak ada filter dari panitia seleksi, sehingga pemilihan dilakukan secara langsung oleh DPR,” jelas Sumarjati dalam keterangan persnya kepada wartawan, Rabu (15/5).

BPK, tambah Sumarjati, merupakan salah satu lembaga tertinggi dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia, dan memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Namun, katanya, dia menilai sistem seleksinya masih terlalu normatif, sehingga perlu adanya per-

baikan.

“Saat ini, syarat untuk menjadi anggota BPK diantaranya WNI, pendidikan minimal sarjana, usia lebih dari 35 tahun, dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun. Dengan persyaratan ini, semua orang bisa melamar sebagai anggota BPK. Tapi menurut saya ini terlalu normatif,” ujar politisi Gerindra ini.

Ia memberikan solusi agar UU BPK diubah, sehingga lembaga yang diberi mandat konstitusi untuk memeriksa keuangan negara ini diisi oleh orang-orang yang sudah matang dan berpengalaman. Selain itu, calon anggota juga memiliki kredibel, kompeten, integritas tinggi, bebas dari keterikatan politik, serta profesional di bidang audit keuangan.

“Calon anggota BPK harus yang sudah profesional. Apakah bisa dibayangkan, lembaga profesional seperti BPK yang mempunyai standar pemeriksaan profesional, dipimpin oleh orang-orang yang kurang pengalaman di bidang audit? Betapa kacaunya itu nanti,” cetus Sumarjati.



Ketua BAKN DPR RI Sumarjati Arjoso.

Sumarjati mencontohkan bahwa di beberapa negara maju, untuk menentukan anggota BPK (*National Audit Commitee*). BAKN turut menentukan penilaian dalam hal kompetensi dan integritas. Namun, saat ini untuk sistem seleksi anggota BPK di Indonesia masih dipilih oleh DPR, dengan sebelumnya memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan nantinya ditetapkan oleh Presiden.

“Saat ini sedang dilaksanakan proses pemilihan anggota BPK untuk menggantikan Taufikurrahman Ruki. Diharapkan kedepannya, hal ini menjadi perhatian kita bersama, khususnya dalam memperbaiki sistem seleksi anggota BPK agar semakin lebih baik,” harap Sumarjati. (sf)/foto:iwan armanias/parle.

## Komisi XI DPR Ke AS Pelajari RUU Perasuransian

Untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Perasuransian, Komisi XI melakukan studi banding ke Amerika Serikat pada 4-10 Mei kemarin. Lalu, apakah hasil studi banding ini?

“Hasil studi banding ke Amerika diantaranya adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan RUU Perasuransian di Amerika, dengan cara menertibkan sistem asuransi dan keanggotaannya. Seluruh rakyat di Amerika sudah memiliki asuransi, ini yang membedakan dengan Indonesia,” jelas Anggota Komisi XI Achsanul Qosasi ketika dihubungi Tim Parle via telepon, Selasa (14/5).

Hal lain yang turut menjadi konsentrasi di studi banding ke Negeri Paman Sam adalah terkait dengan produk-produk asuransi. Achsanul menyatakan bahwa perusahaan asuransi di Indonesia memiliki banyak produk, sehingga dikhawatirkan akan membingungkan masyarakat. Hal ini pula yang akan dibenahi di sistem perasuransian di Indonesia.

“Berikutnya terkait dengan kepemilikan perusahaan asuransi. Kepemilikan asuransi ini harus dalam bentuk badan hukum. Kalau di Indonesia, masih ada yang dalam bentuk mutual atau usaha bersama, contohnya Asuransi Bumiputera. Hal ini juga harus ditertibkan. Bagaimana caranya menertibkan agar perusahaan asuransi bisa dimiliki oleh sebuah



Anggota Komisi XI Achsanul Qosasi.

koperasi, badan hukum, ataupun yayasan, nantinya akan dijelaskan di RUU Perasuransian, termasuk asuransi asing pula,” imbuh Politisi Partai Demokrat ini.

Hasil studi banding yang terakhir terkait dengan asuransi kesehatan dan kendaraan bermotor. Komisi XI merencanakan asuransi kendaraan bermotor akan *linkage* de-

ngan pihak kepolisian dan UU Lalu Lintas. Achsanul menilai asuransi kendaraan bermotor ini cukup penting.

“Artinya asuransi jenis ini harus dilakukan. Nantinya pengguna asuransi membayar premi asuransi maupun pajak kendaraan bermotornya menjadi mudah untuk dilakukan. Karena ada *linkage* itu. Diharapkan nantinya tidak ada se-orangpun yang tidak memiliki jaminan. Misalnya apabila si pengguna asuransi kecelakaan, maka otomatis akan mendapatkan asuransi,” tambah Achsanul.

Ia mengakui bahwa usaha perasuransian di Indonesia cukup tertinggal dibanding dengan Amerika Serikat. Ada beberapa hal yang tertinggal itu antara lain terkait dengan sistem maupun teknisnya.

Menyinggung kapan RUU Perasuransian ini akan diselesaikan, Achsanul menyatakan bahwa Komisi XI akan segera kembali membahas RUU ini pada Masa Persidangan IV. Namun ia menyangsikan Komisi XI dapat menyelesaikannya pada masa persidangan yang dimulai 13 Mei ini.

“Dalam masa sidang ini, Komisi XI akan segera kembali membahas RUU Perasuransian. Namun saya pesimis akan beres dalam masa sidang ini, namun harus selesai di tahun 2013,” janji Achsanul. (sf)/foto:iwan armanias/parle.

## Komisi IX Minta Bupati Tangerang Buat Gugus Tugas

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Irgan Chairul Mahfiz meminta Bupati dan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Tangerang membuat gugus tugas untuk menyelesaikan persoalan penyekapan dan perbudakan buruh pabrik panci di Desa Lebak Wangin, Kecamatan Sepatan, Tangerang.

“Gugus tugas yang tidak melampaui tupoksi dari Disnaker atau ingin menampilkan keberadaan pengawas di level kelurahan atau kecamatan, tapi merupakan sebuah upaya diskresi atau kewenangan Bupati untuk menyelesaikan ini secara cepat,” kata Irgan saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Tangerang, Heri Heriyanto dan jajarannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/5)

Kata Irgan, gugus tugas dimaksud melibatkan seluruh eksponen atau dinas-dinas lain. Khusus untuk melakukan penyisiran, pemantauan, dan koordinasi bagi penyelesaian masalah buruh ini.



Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning dan Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz.

Dengan membentuk gugus tugas, menurut Irgan, menunjukkan kewenangan Bupati untuk menyelesaikan secara cepat tanpa menampilkan apa yang menjadi tugas kewenangan Kadisnaker maupun aparat yang lain.

“Saya kira ini yang harus kita tunjukkan kepada masyarakat yang memang butuh sekali perhatian atas penyelesai-

an ini karena menyangkut buruh dan merupakan persoalan rakyat,” terangnya.

Irgan juga memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah Bupati Tangerang dan jajarannya untuk menyelesaikan persoalan buruh pabrik panci ini.



Sebelumnya dalam rapat yang membahas penyekapan dan perbudakan buruh panci di Tangerang tersebut, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, menjelaskan kronologis penyeragaman terhadap pabrik panci CV. Sinar Logam pada Jumat (3/5) dan langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Dae-

rah Kabupaten Tangerang, serta tindak lanjut penanganan kasus tersebut oleh Kepolisian Metro Tangerang.

Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain, memberikan bantuan kesehatan dan visum serta memfasilitasi kepulangan buruh ke daerah

asal masing-masing buruh. Selain itu, Kadisnaker Tangerang mengupayakan pembayaran upah bagi 34 buruh pabrik panci dengan hitungan sementara sebesar dua milyar. (sc)/foto:odjie/parle.

## PGA Berharap Indonesia Ratifikasi Statuta Roma

Parliamentarians for Global Action - PGA, jaringan anggota parlemen yang berasal dari 130 negara mengajak Indonesia untuk segera meratifikasi Statuta Roma. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dukungan Indonesia akan berpengaruh bagi upaya organisasi ini untuk merangkul negara lain.

“Kalau Indonesia sudah meratifikasi maka kita akan menjadi negara yang paling besar diantara negara-negara yang sudah meratifikasi dan itu barangkali kenapa Presiden PGA sangat ingin kita ikut, supaya bisa menambah *bargaining chip* untuk dapat melobi negara lain, termasuk AS,” kata anggota Komisi III Eva Kusuma Sundari disela-sela kegiatan *Round-Table Discussion on the International Criminal Court - ICC* di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (14/5).

Eva yang juga anggota PGA ini menyebut sikap pemerintah yang belum satu kata membuat proses ratifikasi berlalu-lalu. Informasi yang diperolehnya karena Kementerian Pertahanan masih keberatan. “Draf-nya belum bisa dikirimkan pemerintah ke DPR karena katanya ada hambatan dari Kemenhan,” ungkapnya.

Sementara itu dalam paparannya Presiden PGA Ross Robertson menyebut ada kesalahpahaman dalam memaknai Statuta Roma yang menjadi landasan bagi lahirnya *International Criminal Court* atau Mahkamah Pidana Internasional. “ICC hanya menangani kejahatan dengan skala besar seperti *genocida*. ICC tidak menyangkut insiden satuan tapi



Anggota Komisi III Eva Kusuma Sundari dan Presiden PGA Ross Robertson.

serangan yang sifatnya meluas dan sistematis karena ICC bukanlah pengadilan HAM,” papar Ross yang juga anggota parlemen dari Selandia Baru ini.

ICC tidak akan bersifat retroaktif (berlaku surut) dalam menangani perkara, jadi fokus pada kejahatan serius di masa datang setelah statuta diratifikasi. “Keuntungan lain apabila telah menjadi negara pihak, maka Indonesia akan memiliki pengaruh langsung dan dapat mengusulkan hakim untuk ICC,” pungkask dia. (iky)/foto:iwan armanias/parle.

## Terkait Kasus Muslim Syiah, DPR Akan Panggil Bupati Sampang

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, terkait kasus yang menimpa warga muslim Syiah di Sampang, Madura yang hingga kini belum ada penyelesaiannya, DPR akan segera memanggil Bupati Sampang, Gubernur dan Kapolda Jawa Timur.

Hal itu ditegaskan Ketua DPR ketika menerima pengaduan sekitar 40 orang dari para kiai, ustad dan habaib yang tergabung dalam DPP Ahlulbait dipimpin Ketua Umumnya Hassan Alaydrus di Gedung DPR, Jakarta Selasa (14/5).

Didampingi Pimpinan dan anggota Komisi III dan Komisi VIII DPR, Ketua DPR Marzuki Alie lebih lanjut mengatakan, dirinya terus mengikuti perkembangan dan situasi di Sampang bahkan Komisi VIII dan Komisi III telah meninjau langsung ke lokasi. Yang terjadi di Sampang, menurut Marzuki, tidak se-

suai dengan landasan kita berbangsa dan bernegara yaitu amanat konstitusi dan Pancasila.

“Masih ada pemahaman yang terbatas di daerah-daerah sehingga mengakibatkan konflik bermuatan agama tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Padahal tanggungjawab penanganan konflik sosial ada di pemerintah daerah, sesuai UU No.7/2012,” ujarnya.

Karena menyangkut pelaksanaan UU, menurut Marzuki, menjadi kewajiban DPR untuk mengawasinya. Dari informasi Komisi III dan VIII, Pemda Sampang tidak melaksanakan UU ini. Menjadi kewajiban DPR pula untuk memastikan bahwa semua pejabat negara untuk melaksanakan UU. Kalau UU tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi-konsekuensi.

“Untuk itu kami segera meminta pertanggungjawaban Bupati. Selain itu akan dipanggil Gubernur dan Kapolda Jawa Timur,” sebut Marzuki Alie.

Sebelumnya Habib Umar Shihab mengemukakan, kedatangannya ke DPR dalam rangka menyampaikan harapan dan tuntutan agar warga Syiah di Sampang yang sudah 9 bulan dalam pengungsian di Gedung Olah Raga, namun belum ada tanda-tanda penyelesaian yang jelas.



Ketua DPR Marzuki Alie berjabat tangan dengan pimpinan DPP Ahlulbait.

Bahkan sambungnya, ada upaya-upaya untuk mengusir warga muslim Syiah ini dan akan direlokasi. “Upaya untuk merelokasi dalam bentuk apapun akan kami tolak,” tegasnya.

Hingga kini para pengungsi tetap bertahan dan mengharapkan bantuan DPR agar bisa memperjuangkan hak-hak konstitusional dengan hidup layak sebagai warga negara di kampung halamannya sendiri dapat segera dipenuhi.

Kasus penyerangan dan pembakaran rumah terhadap warga muslim Syiah di Sampang terjadi akhir Agustus lalu, bersamaan dengan hari raya idul Fitri mengakibatkan seorang meninggal dunia, 10 orang luka parah dan 40 rumah dibakar. Warga muslim Syiah di Sampang berjumlah 143 KK terdiri 632 orang, sebelumnya secara turun temurun hidup dalam keadaan rukun dan damai. (mp)/foto: iwan armanias/parle.

## Komisi VIII Dukung Pembelian Pesawat Haji



Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziyah.

Kementerian Agama (Kemenag) berencana memiliki atau membeli pesawat khusus jamaah haji. Hal tersebut menurut Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziyah sudah pernah disinggung pada rapat kerja (raker) sebelumnya. Namun Ida mengaku belum mendapat laporan kejelasan dari rencana tersebut. Seandainya hal tersebut jadi dilaksanakan menurut Ida, itu tidak harus dengan persetujuan dari Komisi VIII.

“Komisi VIII tidak dalam kapasitas memberi persetujuan tentang rencana pembelian pesawat haji, namun kami mendukung usaha pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sepanjang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan haji dan penurunan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH),” jelas Ida Fauziyah yang ditemui pada Selasa (14/5) usai rapat internal Komisi VIII.

Ida meyakini jika rencana itu terwujud dan berjalan dengan baik, maka hal tersebut merupakan sebuah



penghematan yang akhirnya akan berpengaruh terhadap penurunan BPIH. Dengan membeli pesawat haji sendiri itu artinya Kementerian Agama tidak perlu membayar sewa pesawat haji yang biayanya terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Dengan membeli pesawat haji sendiri, selain dipergunakan untuk per-

jalanan ibadah haji, pesawat haji juga bisa digunakan untuk perjalanan umroh, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pesawat berangsur-angsur dapat kembali,” tambah Ida.

Sementara itu menyinggung sumber dana untuk pembelian pesawat haji, Ida mengatakan bahwa dana itu bersumber dari Dana Optimalisasi Haji

atau Dana Abadi Umat yang dimiliki oleh Kementerian Agama.

“Sekarang yang perlu dicermati adalah manajemen atau pengelolaan seperti apa? Prinsipnya selagi tidak melanggar peraturan perundang-undangan Komisi VIII akan terus mendukung hal tersebut,” tegas Ida. (Ayu) foto:odjie/parle/iw.

## Larangan mem-*fotocopy* e-KTP Hanya Untuk Lembaga Pemerintah dan Swasta

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman yang mewakili Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan bahwa larangan mem-*fotocopy* e-KTP hanya ditujukan kepada lembaga dan swasta yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, bukan kepada masyarakat pemilik e-KTP, dengan demikian berarti masyarakat pemilik e-KTP tidak dilarang mem-*fotocopy*.

“Larangan mem-*fotocopy* e-KTP bagi lembaga pemerintah dan swasta yang melayani masyarakat bukan karena kualitas *chip* e-KTP rendah atau mudah rusak, karena e-KTP yang diterapkan di Indonesia sudah memenuhi standar Internasional,” jelas Irman saat RDP dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/5).

Larangan tersebut, menurut Irman, bertujuan untuk menghindari atau mencegah kerusakan *chip* e-KTP dalam jangka waktu panjang, dimana masa berlaku e-KTP direncanakan akan dirubah masa berlakunya dari lima tahun menjadi berlaku seumur hidup melalui perubahan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan mencegah kemungkinan pemalsuan, karena *fotocopy* e-KTP



Ketua Komisi II Agun Gunanjar Sudarsa mencoba card reader e-KTP.

sangat dimungkinkan untuk dipalsukan, mengingat dalam *fotocopy* e-KTP tidak ada lagi *chip*. (nt)foto:wahyu/parle

## Komisi IX Dukung Pembatalan Permenkes No. 7/2013

Sebagai tindak lanjut aksi damai di depan Istana Merdeka pada 7 Mei lalu, Aliansi Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Indonesia Anti Penindasan dan Diskriminasi, mengadukan keluhannya ke Komisi IX DPR RI pada Selasa (14/5). Para bidan desa yang sudah bertahun-tahun mengabdikan pada masyarakat ini meminta Komisi IX untuk membatalkan Permenkes No. 07/2013 yang mengatur penugasan bidan PTT hanya 2 kali masa penugasan.

“Kami bidan desa memiliki Tupoksi

sama dengan bidan PNS lain, malah kami tidak hanya mengobati pasien tapi terkadang kami juga menjangkau atau ikut mendata masyarakat yang terkena penyakit. Artinya tugas kita pun lebih komprehensif. Tapi kenapa setelah sekian lama kami mengabdikan dan tiba-tiba keluar Permenkes No. 7 tahun 2013 itu, dengan hanya dua kali masa penugasan lalu kami dibuang begitu saja. Bagaimana nasib kami selanjutnya,” ujar Ema Maulani, salah satu perwakilan bidan PTT dari Malang.



Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning mengatakan bahwa Komisi IX akan mendukung Aliansi Bidan PTT Indonesia Anti Penindasan dan Diskriminasi untuk menolak atau membatalkan Permenkes No. 07/2013 tentang pedoman pengangkatan dan penempatan dokter dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT).

“Kami akan segera menindaklanjuti aduan tersebut dengan menggelar rapat kerja (raker) dengan Kementerian

Kesehatan, bahkan jika diperlukan kami juga akan menggelar raker gabungan dengan MenPAN untuk membahas hal ini,” tegas Ribka.

Ditambahkan anggota Komisi IX Surya Chandra Surapaty, Permenkes No. 7 tahun 2013 ini jelas melanggar Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 terutama tentang perjanjian kerja antar waktu atau PKWT. Dimana disebutkan bahwa setelah melalui kontrak kerja selama dua kali

masa penugasan maka karyawan atau pekerja itu secara otomatis harus diangkat sebagai pegawai tetap.

“Bedanya kan, kalau di perusahaan bosnya atau pimpinannya pemilik atau manajemen perusahaan. Sementara kalau bidan PTT ini, majikannya atau bosnya pemerintah. Jadi pemerintah harus secara otomatis mengangkat mereka menjadi PNS setelah dua kali masa bakti mereka,” tambah Surya. (Ayu)/foto:ry/parle.

## Sekjen DPR RI Buka Pelatihan I-Perisalah di Bandung

Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti membuka pelatihan I-Perisalah DPR RI di Bandung. Pelatihan I-Perisalah DPR RI tersebut diikuti oleh sekitar 45 Perisalah Setjen DPR RI dan bekerjasama dengan BUMN PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). Pelatihan ini berlangsung selama 3 hari dimulai dari 10-12 Mei 2013, di Bandung.

“Rencana Pelatihan penggunaan teknologi *voice to text* itu sudah lama sekali, bahkan sejak era Faisal Djamil, saya bersyukur program ini akhirnya dapat berjalan hari ini,” jelas Win saat membuka Pelatihan I-Perisalah tersebut, di Bandung, Pada kesempatan tersebut, Sekjen DPR RI didampingi oleh Kepala Biro Persidangan Helmizar, dan sejumlah Kepala Bagian di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI.

Menurut Sekjen DPR, program ini diharapkan dapat memudahkan kerja para transkriptor sehingga dapat memfasilitasi seluruh rapat-rapat di lingkungan DPR RI.

“Semua itu tergantung penggunaannya kalau tidak pas maka alat itu tidak ada manfaat dan kegunaannya, produk DPR itu berdasarkan rapat-rapat, dan semua ada proses pembahasannya. Di seluruh Kementerian atau lembaga hanya di lingkungan Setjen DPR, yang produksinya hasil rapat,” ujarnya.

Win mengatakan, alat I-Perisalah diharapkan dapat mengurangi polemik perbedaan sikap Pemerintah dan DPR yang kerap muncul di berbagai media



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti menerima cinderamata dari Direktur Pemasaran PT INTI.

massa. “Bahkan kita sering temui kerap masing-masing pihak menyangkal telah mengatakan pernyataan itu di ruang Rapat DPR,” ujarnya.

Dia menambahkan, seluruh rapat di DPR harus ada hasil transkripsinya. “Memang sebelum alat I-Perisalah ini digunakan karyawan Setjen DPR kerap mengerjakan transkrip banyak sekali, karena di DPR dalam sehari bisa tiga kali rapat dengan berbagai kalangan baik pemerintah, masyarakat maupun LSM,” terangnya.

Menurutnya, penggunaan alat tersebut sejalan dengan program reformasi birokrasi yang telah digulirkan di lingkungan Setjen DPR RI. “Nantinya

pimpinan akan membagi tugas dan outputnya secara jelas. Semua program ini sejalan dengan keinginan kita semua membangun bagian Risalah, terus terang kita berdebat agar para transkriptor dapat dinilai tinggi oleh Kemenpan dan RB, akhir kata saya sangat bersyukur adanya pelatihan bagi karyawan DPR RI bekerjasama dengan PT. Inti,” ujarnya.

I-Perisalah (*Voice to Text Converter*) adalah sebuah aplikasi pembuat risalah rapat/pidato dengan teknologi *Voice to Text* yang secara otomatis akan mengkonversikan semua pembicaraan para peserta dalam rapat. (si)/foto:iwan armanias/parle.



# Komisi VI DPR Kunjungi Stasiun KA Jabodetabek



Tim Komisi VI saat mengunjungi stasiun KA Bogor.

Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke beberapa stasiun kereta api (KA) di wilayah Jabodetabek, Rabu (15/5). Kunjungan ini untuk melihat dari dekat revitalisasi stasiun-stasiun di sepanjang jalur Jabodetabek. Siang itu, Komisi VI mulai menyisir jalur kereta api dari Stasiun Gambir hingga Stasiun Bogor dengan menggunakan gerbong kereta khusus. Sepanjang perjalanan, Komisi VI mendapat penjelasan dari PT. KAI seputar program revitalisasi stasiun.

Ikut dalam rombongan tersebut Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto, dua Wakil Ketua Erik Satrya Wardhana dan Aria Bima, serta para anggota Komisi VI lainnya. Kunjungan ini menindaklanjuti kondisi terakhir di beberapa stasiun setelah PT. KAI menertibkan semua areal stasiun dari para pedagang kaki lima (PKL). Ada benturan fisik yang terjadi sebelumnya. Bahkan para PKL itu telah mengadu ke Komisi VI pada Senin (13/5) lalu.

Dalam perjalanan itu, rombongan Komisi VI singgah di Stasiun Cawang, Stasiun Cilebut, dan Stasiun Bogor.

Para anggota Komisi VI tersebut mendatangi satu per satu para pedagang yang beraktivitas di stasiun. Afandi, pedagang gorengan di Stasiun Cawang menjelaskan kepada para anggota Komisi VI yang menghampiri. Pihaknya menjelaskan, selalu membayar sewa tempat Rp 10 ribu per minggu. Sebagai warga asli di Cawang, ia sudah berdagang sejak rel keretanya masih tunggal, belum seramai seperti sekarang.



Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto dan rombongan saat meninjau stasiun KA Cawang.

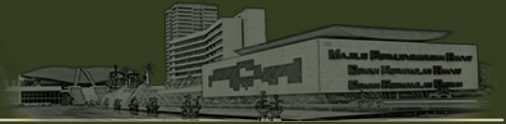
Tempat berdagangnya persis di pinggir stasiun dan dibatasi pagar besi. Para anggota mengorek banyak keterangan dari para pedagang untuk kemudian menjadi bahan masukan dalam mengambil solusi saat rapat

dengan para pihak terkait di Komisi VI. Selama ini ada kecemburuan sosial antara para pedagang kecil dan para pengusaha ritel seperti Indomart dan Alfa Mart yang sama-sama berdagang di areal stasiun. Para pedagang kecil tergusur, sementara pengusaha ritel tetap berada di stasiun.

Ada temuan pula yang dipantau oleh Wakil Ketua Komisi VI Erik Satrya Wardana soal apartemen yang berdiri di atas tanah milik PT. KAI, dekat stasiun Cawang. Mereka mempertanyakan peruntukkannya. Dan ini menjadi temuan penting di lapangan. Belum ada penjelasan rinci dari PT. KAI soal apartemen tersebut.

Sementara itu PT. KAI akan memperlakukan *E-Ticketing* pada Juni 2013. Satu kali pembelian tiket untuk satu perjalanan. Di Stasiun Bogor, PT. KAI terlihat sedang membangun infrastrukturnya berupa gerbang masuk stasiun. Jadi, yang tidak memiliki tiket tidak bisa masuk ke areal stasiun. Tidak ada lagi penumpang liar, apalagi yang menaiki gerbong kereta. (mh)/foto:odjie/parle/iw.





Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso membuka diskusi tentang Statuta Roma di Gedung Nusantara III DPR, dilanjutkan foto bersama dengan Ross Robertson (Presiden PGA) dan Mark Pritchard (Board Member of PGA) didampingi anggota Komisi III Eva Kusuma Sundari dan Marzuki Darusman, Selasa (14/5). Foto: Iwan Armanias/parle.



Komisi II DPR mengujicoba Card Reader e-KTP Buatn Amerika, Korea dan BPPT di ruang rapat Komisi II, Gedung Nusantara, Kamis (16/5). Foto: wahyu/parle



Suasana dialog Komisi VI dengan jajaran PT KAI di gerbong kereta khusus, dilanjutkan kunjungan lapangan ke Stasiun KA Bogor, Rabu (15/5). Foto: Odjie/parle